

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori-teori yang Terkait dengan Penelitian

1. Ideologi Pancasila

Pancasila merupakan hasil kesepakatan filosofis dan politis dari seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk mendirikan negara. Menurut Ir. Soekarno, Pancasila dapat diartikan sebagai kesepakatan Sosial dari seluruh unsur atau komponen masyarakat Indonesia dalam proses pendirian negara dan mendorong kemajuan bangsa dengan mengadopsi falsafah Indonesia. Tujuan utama Pancasila adalah menjadi dasar filsafat negara, yang berimplikasi pada seluruh dimensi pelaksanaan pemerintahan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila.¹

Pancasila memiliki perbedaan dalam asal-usulnya jika dibandingkan dengan ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, sosialisme, dan lain sebagainya. Pembentukan Pancasila melibatkan para pendiri negara yang secara cermat mengamati, mendiskusikan, dan mencapai konsensus mengenai nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut berasal dari kearifan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dan diolah bertransformasi menjadi prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi refleksi Nilai-nilai kultural dan religius yang mendasarinya berasal dari identitas budaya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, bangsa Indonesia merupakan asal-muasal materi yang menjadi landasan bagi Pancasila. Sehingga, terdapat keselarasan Hubungan antara bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai suatu sistem nilai.²

Dari segi hukum atau yuridis, Pancasila atau lima dasar memiliki definisi yang tercantum dalam susunan atau rumusan yang diatur dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Rumusan Pancasila tersebut yakni :1) Ketuhanan Yang Maha Esa. 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Persatuan Indonesia. 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh

¹ Ronto, *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012).

² Farina Trias Alwasi et al., "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Menjaga Eksistensi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Di Era Globalisasi," *Jptam.Org* 5 (2021): 7491–96, <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2185>.

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³ Berdasarkan hubungan kausalitas sebagai akibat dari prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan, Pancasila diakui sebagai milik bangsa Indonesia. Pada awalnya, Pancasila merupakan filsafat hidup masyarakat, namun seiring perjuangan bangsa Indonesia yang berusaha menggali identitasnya selama masa penjajahan, Prinsip-prinsip nilai tersebut terbentuk secara konsisten dan komprehensif sebagai nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya proses kausalitas ini, Pancasila akhirnya diakui sebagai kebenaran dan kesesuaian dengan jati diri bangsa Indonesia, sehingga secara resmi diakui sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia.

Konsep ideologi memiliki jejak sejarah yang dapat dilacak jauh sebelum *dettut de Tracy* yang akhirnya mengaplikasikan istilah tersebut pada abad ke-18. Tracy merujuk pada ideologi sebagai ideologi, yakni Ia mengembangkan sebuah inisiatif yang diharapkan dapat memicu perubahan struktural dalam masyarakat Prancis. Meskipun demikian, Napoleon mengkritik istilah "ideologi," menyatakan bahwa konsep tersebut hanya bersifat khayalan tanpa tujuan praktis. Meskipun demikian, pernyataan ini hanya mencerminkan khayalan semata yang tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan.⁴

Istilah "ideologi" berasal dari kata "idea," yang merujuk pada gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan "logos" yang berarti pengetahuan. Secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu ide atau ajaran tentang pokok bahasan pemahaman dasar.⁵ Ideologi mendasarkan diri pada seperangkat nilai atau sistem nilai fundamental yang luas dan mendalam. Oleh karena itu, ideologi menjadi milik bersama masyarakat atau individu sebagai pandangan atau perspektif terhadap kehidupan. Nilai-nilai yang menyatu dalam sistem ini, contohnya, terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Umumnya, Prinsip-prinsip ini berasal dari nilai-nilai budaya dan pengalaman sejarah yang dialami oleh

³ Taufiqurrahman, *Pendidikan Pancasila*, 2018.

⁴ Taufiqurrahman.

⁵ Widiatama Widiatama, Hadi Mahmud, dan Suparwi Suparwi, "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 310, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

masyarakat atau individu yang merumuskan ideologi tersebut.

Definisi ideologi dapat bervariasi menurut para ahli dunia, namun pada dasarnya mereka memiliki makna yang hampir serupa dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh individu yang memahami atau menganut suatu ideologi. Martin Sileger mengatakan bahwa ideologi dapat dipandang sebagai kerangka kepercayaan., Alvin Gouldner melihatnya suatu proyek nasional, dan Paul Hirst menjelaskannya bentuk hubungan sosial. Dalam konteks dunia, ideologi digunakan untuk memahami berbagai ideologi yang dianut oleh negara-negara, seperti Liberalisme, Sosialisme-Komunisme, dan Pancasila.⁶

Menurut Satraprateja, pemahaman terhadap ideologi Pancasila dapat diperoleh dengan memahami ideologi tersebut dalam konteks global, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Marxisme-Leninisme adalah suatu kerangka konsep yang meneliti ideologi melalui lensa evolusi sejarah, dengan landasan pada dua prinsip pokok. Prinsip pertama menyatakan bahwa perubahan signifikan dalam struktur sosial terjadi sebagai konsekuensi dari perubahan dalam mode produksi. Perubahan sosial bersifat dialektis, yang berarti terjadi melalui proses saling berinteraksi dan bertentangan antara kekuatan atau elemen yang berbeda dalam masyarakat.
2. Sosialisme merupakan suatu pandangan menitikberatkan ideologinya pada kepentingan kolektif, yaitu negara. Kesetiaan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dikenal sebagai konsep negara kesejahteraan.
3. Liberalisme adalah suatu pandangan yang mengedepankan ideologinya pada aspek kebebasan individu, yang mengacu menempatkan hak-hak individu sebagai prioritas utama.

⁶ I Wayan Tagel Eddy, "Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Globalisasi dan Perdagangan Bebas," *Dharmasmrti* 13, no. 75 (2018): 116–23.

4. Kapitalisme merupakan sebuah ideologi dimana memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengatur sistem.⁷

Ideologi Pancasila tidak dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan perjuangan kelas, kelompok, atau golongan primordial tertentu. Secara pokok, Pancasila adalah suatu ideologi yang menampung semua segmen masyarakat, kelompok, dan unsur-unsur bangsa untuk mencapai tujuan hidup bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, ideologi Pancasila tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelas atau golongan khusus. Secara ontologis, ideologi Pancasila mengadopsi prinsip monop pluralisme yang berasal dari manusia, baik sebagai individu maupun sebagai entitas sosial. Rakyat Indonesia memegang teguh prinsip ini, terdiri dari individu, keluarga, kelompok, golongan, suku bangsa, dan eksis dalam lingkungan wilayah yang kaya akan budaya dan keragaman, yaitu tanah air Indonesia yang membentang di berbagai pulau sebagai satu kesatuan integral, baik secara fisik maupun spiritual.

Dalam prinsip pertama Pancasila, negara memberikan perlindungan kepada semua warga negara dan keturunan Indonesia, ditegaskan bahwa kesatuan integral bangsa dan negara Indonesia merupakan hal yang fundamental. Manusia, sebagai makhluk yang saling ketergantungan, tidak dapat diartikan sebagai individu sepenuhnya seperti yang diakui dalam prinsip negara liberal. Sebaliknya, manusia juga bukanlah makhluk sosial semata, sebagaimana yang ditekankan oleh prinsip negara komunis. Ketergantungan antarindividu mencerminkan bahwa manusia adalah entitas yang bersifat total, dengan keberadaan sebagai makhluk individual dan sosial secara bersama. Konsep hidup bersama menjadi manifestasi dari kesatuan dalam suatu bangsa, yang bersifat integralistik.⁸

Pancasila sebagai Hakikat negara merupakan sebuah entitas integral dimana terbentuk dari unsur-unsur yang

⁷ Fadilah, "Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0."

⁸ Natal Kristiono, "Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang," *Harmony* 2, no. 2 (2017): 193–204, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/20171/9563>.

membentuknya. Negara Pancasila dianggap melampaui segala golongan dan bagian-bagian yang membentuknya, dengan tidak memihak pada golongan tertentu atau memberikan prioritas pada golongan mayoritas. Konsep negara dan bangsa dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dari semua unsur yang membentuknya. Dalam konteks kehidupan kemasyarakatan dan negara, ideologi Pancasila menolak pemisahan antara masyarakat dan negara.

Negara didefinisikan sebagai suatu entitas hukum yang terorganisir, di mana setiap anggota, bagian, lapisan, kelompok, dan golongan yang membentuk negara saling terkait dan membentuk satu kesatuan organik. Elemen-elemen dalam negara memiliki posisi, status, dan peran yang masing-masing harus dihormati, dijamin, dihargai, dan diakui. Setiap elemen ini bertanggung jawab untuk menciptakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama, yang tercermin dalam prinsip *Bhineka Tunggal Ika*.⁹

Pancasila memuat nilai kesakralan (religius) sebagai sumber etika dan spiritualitas yang dianggap penting sebagai landasan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, dibandingkan menjadi negara yang sangat sekuler yang memisahkan agama dan negara. Indonesia mempunyai potensi untuk mendorong peran agama ke komunal. Negara bersifat netral dan menjaga jarak yang sama terhadap agama/keyakinan, melindungi semua agama dan mengembangkan kebijakan berdasarkan nilai-nilai agama. Agama harus bisa berperan terkait etika, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang berjumlah jiwa beragama islam, maka tidak ada alasan untuk meragukan bahwa Pancasila merupakan bagian dari sistem ideologi yang mempunyai landasan dan filosofis islam.¹⁰

Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, pada sila pertama yaitu dijelaskan dengan surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya :

⁹ Kristiono.

¹⁰ MK Ridwan "Penerapan Pancasila Perspektif Islam", Peta dan Konsep Dialogia Vol. 15, No. 2

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝
 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

“Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah tuhan yang kepada-Nya segala sesuatu bergantung. Dia tiada beranak dan tidak pula diperankan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”

Pada sila ini menekankan bahwa fundament etis-religius atas bangsa Indonesia dari moral ketuhanan dan sekaligus pengakuan akan pluralitas keagamaan islam memandang sila pertama Pancasila sebagai dasar keimanan dan ketauhidan. Dan menurut islam bahwa dimensi keimanan terletak pada individu masing-masing.

Sila yang kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, sila ini mengandung hubungan antara manusia dengan sesamanya (Hablum Min An-Nas). Dalam sila ini berkaitan dengan syari’ah yaitu dalam ibadah sosial yang mencakup bidang kemasyarakatan (as-siyasah) islam berdasarkan sikap untuk menghormati dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah:177. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia adalah Sebagian dari kemanusiaan yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban.

Pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia (Ukhuwah) sila ini mencerminkan ide ukhuwah insaniyah (persaudaraan manusia) allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 103,

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

“Berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan

nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al-imran: 103)

silanya ketiga ini merupakan sikap toleransi antar sesama sikap mengahragai dan menghormati.

Silanya keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dalam Islam yaitu medzakah dan syura. Syura memiliki prinsip sistem kenegaraan Islam, prinsip syura dalam Pancasila membuktikan bahwa perumusan Pancasila di ambil dalam bentuk musyawarah Bersama dan berbagai kalangan untuk mencapai kesepakatan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 159:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekitarnya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”

Pada silanya kelima dalam Pancasila sangat menjunjung tinggi keadilan, dalam Al-Qur'an menjunjung tinggi keadilan merupakan bentuk amal yang dekat dengan ketakwaan. Isi terkandung dalam UUD 45 yaitu semangat anti penindasan dan penjajahan.¹¹

2. Tantangan Terhadap Ideologi Pancasila

Tantangan globalisasi terhadap nilai-nilai ideologi, hingga saat ini, mencakup perkembangan perbedaan pemahaman yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip ideologi Pancasila. Fenomena ini mengakibatkan munculnya dialektika dan konflik nilai di kalangan warga negara, dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman dan kesadaran terhadap nilai bersama, serta situasi lingkungan di sekitarnya. Kondisi lingkungan mencakup aspek komunikasi dan dampak pengaruh dunia maya melalui media sosial. Sebagian anak negeri menunjukkan kecenderungan dalam

¹¹ Husnul Khotimah, “Penerapan Pancasila Perspektif Islam” University Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia

pola pikir, sikap, dan perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai persatuan yang diamanatkan oleh ideologi nasional, yang dijabarkan dan dijelaskan dalam norma-norma nilai dalam setiap sila Pancasila.

Tantangan pertama yaitu tantangan dan konseskuensi penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila antara lain bagi anak bangsa dapat dilihat dari hasil interkasi salah satu nilai spiritual iman padan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai komunisme atau sosialisme, sekularisme, teokrasi dan liberalisme. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, aspek spiritualitas melibatkan nilai-nilai dasar yang mencerminkan aspirasi negara dan prinsip hubungan sebab-akibat antara Tuhan, manusia, dan Negara. Dalam konteks ini, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk mengikuti agama sesuai dengan keyakinan pribadinya.¹²

Ideologi komunisme atau sosialisme meyakini bahwa pengendalian atas kepemilikan modal harus berada di tangan negara dengan tujuan menciptakan kesejahteraan yang merata. Dasar dari komunisme/sosialisme ini bersumber pada perspektif materialistis dan bersifat ateis karena manusia dianggap menentukan nasibnya sendiri dan tidak terkait kausal dengan Tuhan. Sekularisme adalah pandangan yang menegaskan pemisahan antara urusan agama dan negara, sedangkan teokrasi adalah keyakinan bahwa negara dan agama tidak dapat dipisahkan. Di sisi lain, Liberalisme berkembang dari akar rasionalisme dan individualisme, menempatkan nilai dan kebebasan individu sebagai hal yang paling tinggi dalam kehidupan bersama dan negara.

Tantangan kedua terkait dengan hasil dari saling berinteraksi antara nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam menghadapi fundamentalisme dan sektarianisme dapat diamati melalui dampak penerapan Pancasila orde kedua terhadap anak bangsa. Perintah kedua ini mencakup pengakuan akan hakikat manusia terdapat dalam sifatnya sebagai individu dan entitas sosial, yang mana bangsa Indonesia diakui sebagai bagian dari kemanusiaan. Tantangan terkait dengan nilai sila kedua mencakup

¹² Bartolomeus Samho dan Rudi Setiawan, "Mengartikulasi Pancasila Menjadi Spiritualitas Kehidupan Bangsa Indonesia Yang Majemuk: Sebuah Kajian Filosofis," *Research Report - Humanities and Social Science* 2, no. 0 (2015): 1-96, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/view/1683>.

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk memperoleh informasi, hak untuk dihormati dalam martabat diri, dan hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan pribadi. Era keterbukaan informasi saat ini sering kali diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, mengakibatkan sejumlah tindakan seperti perundangan, persekusi, dan penghujatan terhadap individu.¹³

Tantangan yang ketiga yaitu tantangan dan konsekuensi penerapan nilai-nilai sila Pancasila bagi anak bangsa antara lain terlihatnya interaksi antara nilai-nilai persatuan Indonesia dengan nilai-nilai keindonesiaan. Hegemoni komunal, dan pesimisme. Pada dila ketiga ini mengandung nilai persatuan dan keragaman serta mengacu pada persatuan yang kokoh sebagai bangsa yang merdeka Bernama Indonesia. Dalam kerangka kebhinekaan Indonesia, konsep tersebut melibatkan individu, keluarga, kelompok, kelas, suku, dan keragaman wilayah, yang diartikan sebagai entitas yang memiliki definisi secara menyeluruh, baik dari segi fisik maupun mental. Dan yng lain, hegemoni sekte atau komunitas merujuk pada pandangan yang didasarkan pada ideologi kelompok tertentu yang mencapai status sebagai komunitas dengan hak eksklusif.¹⁴

Untuk mewujudkan nilai ketiga, perlu diperhatikan orientasi persatuan sebagai anggota masyarakat dengan memperhatikan kepentingan kelompoknya. Selain itu, perlu mendapatkan perhatian juga aktualisasi orientasi etnisitas sebagai bentuk perilaku yang perlu diperhatikan. Terdapat tanda-tanda perilaku sebagian individu dalam masyarakat yang lebih mengutamakan kelompoknya dibandingkan dengan keseluruhan masyarakat Indonesia. Menurut pandangan masyarakat, terdapat kecenderungan bahwa penduduk dari negara lain memiliki keterikatan emosional yang lebih mendalam dibandingkan dengan masyarakat di negaranya sendiri. Ini mencerminkan pola globalisasi yang ditandai oleh sifat internasionalisme, di mana batas-batas

¹³ "No Title," n.d., <https://bpip.go.id/berita/991/582/pentingnya-pengamalan-pancasila-sila-ke-2-di-lingkungan-masyarakat.html>.

¹⁴ Mahnan Marbawi, "Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Pendidikan," *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 6, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.15548/turast.v6i2.68>.

negara lebih bersifat politis, sedangkan pemahaman masyarakat meluas melewati batas-batas negara.

Tantangan keempat, yang melibatkan konsekuensi penerapan Pancasila bagi anak bangsa, dapat terlihat dari interaksi nilai-nilai sosial yang memiliki nuansa politik representasi terhadap nilai-nilai liberalisme dan dominasi sektarianisme. Tantangan ini melibatkan nilai penghormatan terhadap demokrasi yang bersumber dari kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, penguatan persatuan dan kesatuan tanah air, serta mencapai kemakmuran untuk keberlangsungan hidup bersama. Tantangan dalam implementasi nilai sila keempat terlihat dalam praktik politik identitas, rasional, dan moneter. Politik identitas merujuk pada praktik demokrasi yang berdasarkan pertimbangan asal-usul. Dalam konteks yang berbeda, bahwa masyarakat didorong oleh elit politik untuk memilih tokoh berdasarkan suku, seolah-olah memberikan hak pilih kepada masyarakat dengan alasan yang dapat menimbulkan kesan bahwa demokrasi tidak adil.¹⁵

Tantangan dan dampak aktualisasi nilai kelima dari Pancasila pada individu dalam masyarakat dapat diamati dari nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dengan nilai-nilai kapitalisme, hedonisme, dan individualisme. Sila kelima melibatkan nilai keadilan untuk menciptakan kebersamaan hidup yang baik dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tantangan dalam merealisasikan nilai sila kelima dapat terlihat dari dominasi pemilik modal besar dapat mengendalikan pasar, menyebabkan pemilik bermodal kelas bawah dengan modal kecil akan tersingkirkan. Tantangan terhadap nilai ini juga tercermin dalam perilaku hedonis terhadap penduduk, yang melibatkan gaya hidup berlebihan sebagai bagian dari perilaku hedonis tersebut.¹⁶

3. Penguatan Ideologi Terhadap Masyarakat

Bidang ideologi adalah realitas dinamis dalam suatu negara yang memuat Ketahanan dan ketangguhan melibatkan

¹⁵ Fadilah, “Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0.”

¹⁶ Dwi Yani, Dini Anggraeni Dewi, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Tantangan di Arus Globalisasi,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 952–61.

kemampuan untuk memperkuat ideologi dalam menghadapi serta mengatasi berbagai tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam sejarahnya, Indonesia mengalami berbagai tantangan dan gangguan selama periode reformasi, terutama terkait dengan politik demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Kelompok masyarakat sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia Seringkali dihasut oleh beberapa elit politik yang mengalami kegagalan mendapatkan posisi politik di tingkat pusat, dengan alasan dan perasaan kekecewaan tertentu. Hal ini mendorong kelompok tersebut untuk mengumpulkan kekuatan guna menyuarakan aspirasinya melalui rakyat, yang mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang proses demokrasi dan kebebasan pada era reformasi.¹⁷

Proses kehidupan bersama dalam suatu negara bertujuan untuk memperkuat ketahanan dalam bidang ideologi, yang dipengaruhi oleh sistem nilai. Ini berarti bahwa relevansi ideologi terletak pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang mampu memenuhi dan menjamin berbagai aspirasi dalam kehidupan masyarakat, baik secara individu, dalam konteks kehidupan sosial, maupun sebagai warga negara, sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap bangsa mengembangkan ideologi yang sesuai dengan filosofi atau pandangan hidupnya, menciptakan suatu sistem nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa tersebut.

Ketahanan dalam ranah ideologi perlu direalisasikan baik dalam konteks kenegaraan maupun kewarganegaraan. Ini menyiratkan bahwa ideologi harus diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan setiap individu, dalam kerangka berbangsa dan bernegara, serta secara resmi dalam struktur kenegaraan. Pelaksanaan ideologi dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi objektif melibatkan implementasi ideologi dalam struktur kenegaraan, termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di sisi lain, aktualisasi subjektif merujuk pada implementasi ideologi dalam kehidupan sehari-hari warga negara, termasuk sikap, perilaku, dan kepribadian individu dalam konteks kehidupan bersama. Tingkat kesadaran dan kesungguhan

¹⁷ Yani, Anggraeni Dewi, dan Guru Sekolah Dasar.

suatu bangsa dalam menerapkan ideologi, baik secara objektif maupun subjektif, akan memengaruhi kuatnya fondasi ideologi dalam masyarakat.¹⁸

Dalam memperkuat ideologi, esensial untuk menanamkan dan memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa, yang berasal dari prinsip-prinsip rohaniah ideologi Pancasila yang menekankan pada keragaman dalam kehidupan bersosial, berbangsa, dan bernegara. Ideologi ini memiliki tujuan mencapai persatuan, kesatuan, dan kesejahteraan bagi rakyat, sekaligus menghindari arah disintegrasi yang dapat merugikan bangsa. Pemahaman akan kepentingan mencapai cita-cita bangsa yang tercermin dalam ideologi Pancasila sangat diperlukan. Berikutnya, penting untuk mengembangkan serta Menyadarkan generasi penerus terhadap rasa kebangsaan dan loyalitas terhadap negara dengan menyampaikan Pancasila sebagai ideologi yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, religiusitas, demokrasi, nasionalisme, dan keadilan. Sebaiknya, proses penanaman nilai-nilai ini dilakukan secara obyektif dan berbasis ilmiah, bukan melalui pendekatan doktriner. Pendidikan pada berbagai tingkatan memiliki potensi sebagai sarana yang efektif untuk mencapai tujuan ini, dengan menerapkan metode yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang bersangkutan. Menumbuhkan sikap positif warga negara terhadap kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga bisa dicapai dengan meningkatkan motivasi dalam proses pembangunan nasional. Terutama pada era reformasi, perhatian utama harus difokuskan pada peningkatan kualitas hidup rakyat, sehingga krisis multidimensi yang sedang dihadapi oleh Indonesia dapat segera berakhir.¹⁹

4. Upaya Penguatan Ideologi

Karena Indonesia adalah negara besar dan memiliki banyak agama yang berbeda, maka Diperlukan komunikasi dan dialog antar umat beragama.

¹⁸ Siti Patimah et al., “Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Mahasiswa dan Masyarakat,” *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education* 1, no. 2 (2021): 48–57, <https://doi.org/10.31539/ijocce.v1i2.2398>.

¹⁹ A Widjojo, “Pemantapan Nilai-Nilai Ideologi Bangsa Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional Dalam Aras Global,” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri* ..., 2016, 7–18, <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/489>.

1) Dialog

Dialog harus dibangun dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman tentang kesatuan pikiran dan hati di antara para pemeluk agama berbeda. Karena tanpa hubungan dialogis yang harmonis, maka setiap pemeluk agama akan cenderung menjadi tertutup.

Ideologi Pancasila menjadi pedoman bagi setiap anak bangsa, apapun agamanya yang berbeda, namun harus membuka ruang dialog untuk saling memahami curahan isi hati. Dialog memiliki manfaat luar biasa yang bisa menguatkan Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam hati yang tak tergoyahkan. Bersama-sama kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Radikalisme agama dapat diprediksi dengan mengunjungi ruang dialog. Percakapan yang dapat membuka wawasan untuk komunitas mana pun. Dulukan kepentingan bangsa dan jauhkan diri dari pikiran negatif fundamentalis agama berdasarkan pertimbangan HAM dan ideologi Pancasila. Harus dipahami bahwa radikalisme agama memiliki ruang untuk berkembang muncul karena kurangnya dialog antara umat beragama. Kegiatan dialog Promosi di kalangan umat beragama sebagai bagian dari upaya penguatan ideologi Pancasila dan deradikalisasi agama yaitu menciptakan komunikasi yang erat karenanya diskriminasi jauh atau pengecualian dari agama tertentu yang berbeda.²⁰

Dialog antar umat beragama harus berlangsung secara massal dan berkesinambungan cara yang berbeda karena dapat meningkatkan dan meningkatkan rasa saling pengertian dan penerimaan perbedaan. Perbedaan agama yang ada saat ini harus diperbaiki melalui dialog, untuk dilihat bukan sebagai ancaman tetapi sebagai keindahan yang harus selalu dijaga dan didukung di kalangan anak bangsa. Dialog sebagai perwujudan penguatan ideologi Pancasila yang selalu menjadi keharusan dijadikan budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Berdasarkan konteksnya. Dalam percakapan ini, dialog tidak digunakan sebagai ajang pembelaan diri untuk berpartisipasi dalam

²⁰ Muh. Zubair et al., "Sosialisasi Bahaya Penyebaran Paham Radikalisme Melalui Literasi Media Online Di Pondok Pesantren Unwanul Falah NW Paok Lombok, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 4 (2021): 383–89, <https://doi.org/10.29303/jpmp.4i4.1107>.

dialog antaragama. Tapi sebagai kegiatan yang meliputi Motivasi, toleransi, demonstrasi kepedulian, kerja sama dan rencana penguatan Kesetaraan antar kelompok agama yang berbeda. Ini sangat penting Tidak ada lagi agama yang merasa dipinggirkan atau diunggulkan.

2) Gotong Royong

Nilai-nilai gotong royong merupakan implementasi dari ideologi Pancasila. saling budaya Kerja sama telah menjadi cara hidup dan kebiasaan yang selalu dijaga dan dipupuk leluhur Indonesia. Gotong Royong mengandung nilai-nilai kehidupan positif yang harus dalam setiap masyarakat Indonesia sebagai membantu, peduli, semangat gotong royong tanpa dilatarbelakangi oleh sikap memecah belah baik dari segi budaya, bahasa, suku dan agama. Setiap masyarakat Indonesia harus hidup sebagai bagian dari pemikiran Gotong Royong Upaya menetralkan perilaku individualistis dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Nilai-nilai Gotong Royong harus diterapkan dalam segala bidang kehidupan Marilah bangsa Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan. Itu tertunda dengan semangat ideologi Pancasila yang mengedepankan kebersamaan dan menyemangati setiap orang mengajak warganya untuk bahu membahu dengan sepenuh hati menyelesaikan masalah untuk eksis tanpa perbedaan mengganggu.²¹

Budaya gotong-royong dipraktikkan secara masif di masyarakat kaya meningkatkan rasa memiliki dan memperkuat ikatan/persaudaraan. Pada prinsipnya, manusia merupakan entitas sosial yang tidak dapat mencapai puncak kinerja secara individual. Artinya nilai-nilai gotong royong menjadi bagian Untuk memperkuat ideologi Pancasila yang dapat memperkuat rasa solidaritas.

Nilai-nilai gotong royong sangat kontras dengan ideologi radikalisme agama menarik diri dan hanya berpikiran sempit bahwa dia hanya ingin bekerja sama dengan orang/partai yang seagama atau berkeyakinan dengannya. Pemahaman seperti itu akan merusak keharmonisan yang telah tercipta di antara anak bangsa. Radikal percaya bahwa dirinya dapat melakukan semuanya

²¹ Andi Azikin, "Konsep Dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2018, 77–90, <https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1098>.

sendiri dan tanpa perlu Mendukung dan bekerja sama dengan kelompok agama lain yang menyimpang dari ini. Itu berarti radikalisme agama sebagai ideologi yang tidak mendukung terwujudnya nilai-nilai gotong royong, justru mampu mempersatukan berbagai perbedaan. di tengah kebhinekaan bangsa Indonesia yang begitu besar. Ideologi Pancasila harus dilestarikan di Indonesia karena merupakan landasannya semangat gotong royong serta bagian dari upaya deradikalisasi melalui pemberdayaan ideologi Pancasila. melalui Deradikalisasi melalui nilai-nilai Gotong Royong menyadarkan kita bahwa tidak ada manusia sebagai makhluk sosial yang dapat melakukan hal yang berbeda sendirian, melainkan harus terbuka menerima keberagaman untuk kepentingan dirinya dan bangsa.²²

3) Menghilangkan Konsep Mayoritas dan Minoritas

Elemen masyarakat yang terpapar radikalisme agama seringkali menggunakan istilah-istilah “diskriminatif” seperti istilah “mayoritas-minoritas”, yang hanya menunjukkan bahwa mereka yang tergabung dalam kelompok mayoritas lebih kuat dan lebih baik. Kalangan radikal sering menggunakan istilah ini untuk merujuk pada tindakan yang dapat mengintimidasi orang yang berbeda agama untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ungkapan "mayoritas dan minoritas" dalam urusan kepercayaan/keagamaan merupakan pola diskriminatif yang kerap dilontarkan kaum radikal untuk memecah belah keragaman di dalam bangsa Indonesia.

Kaum radikal ingin tampil berpihak pada jumlah yang jauh lebih besar, Pendekatan ini bisa dilihat sebagai sarana untuk mengintimidasi kelompok agama lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Konsep mayoritas, yang sering salah kaprah di kalangan masyarakat yang terpapar radikalisme agama, menganggap mereka lebih kuat/unggul dan derajatnya lebih tinggi dibandingkan pemeluk agama lain. Ini disalah gunakan untuk mengintimidasi dan memaksa orang-orang dari agama lain untuk mengikuti/mematuhi apa yang mereka yakini benar. Jika ada minoritas yang mau memeluk agama yang diyakininya, mereka akan diintimidasi

²² Keysa Afgrinadika Wibowo, Fatma Ulfatun Najicha, dan Info Artikel Abstrak, “Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi,” *Journal of Education, Psychology and Counseling* 4, no. 1 (2022): 22–31.

dan dijadikan musuh. Ketika berbicara tentang kehidupan beragama, masyarakat mayoritas percaya bahwa minoritas harus menerima agama mereka sebagai kebenaran mutlak. Ketika minoritas tidak melakukan ini, mereka dipandang sebagai semacam perlawanan, sehingga mereka didiskriminasi, diintimidasi, dan dicap sebagai kelompok sesat.²³

Kaum radikal sering “bersembunyi” di balik konsep mayoritas untuk mengintimidasi berbagai pihak yang berbeda agama. milik mereka. Kelompok radikalisme agama berupaya membatasi kebebasan menganut keyakinan beragama sesuai dengan keyakinannya. Sehingga hal ini sangat kontras dengan ideologi Pancasila yang menyamakan setiap warga negara Indonesia tanpa pernah membedakan kelompok mayoritas dan minoritas. Artinya, semua warga Indonesia memiliki hak yang setara untuk memilih dan menganut agama dan menjalankan agamanya dengan bebas. Memperkuat ideologi Pancasila sebagai pendekatan deradikalisasi Demi memelihara harmoni dalam kehidupan beragama di Indonesia. Pancasila menyadarkan masyarakat bahwa masyarakat yang dewasa dapat menerima keberagaman dalam berbagai bentuk dan tidak pernah menggunakan ungkapan yang mengandung unsur diskriminatif seperti core abuse dan paham mayoritas-minoritas.²⁴

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) dan Tugas-Tugasnya

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran membantu Bupati dalam menjalankan urusan pemerintah umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Fungsi yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak antara lain:

²³ Sudi Raharjo, “Dampak Radikalisme Atasnama Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Secara Luas,” *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* 36 (2022): 44, <https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v36i0.1962>.

²⁴ Yakobus Adi Saingo “*Penguatan Ideologi Pancasila Sebagai Penangkal Radikalisme Agama*” Manajemen Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang Vol 5 No 2 (2022)

1. Merumuskan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
 2. Melaksanakan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
 3. Menjalankan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
 4. Melaksanakan tugas administratif dan kesekretariatan untuk seluruh unit kerja di lingkungan Badan.
 5. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁵
- 6. Tugas dan Fungsi serta jabatan struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, disebutkan bahwa badan ini memiliki tanggung jawab membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan kewenangan Daerah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengepalai badan ini, berkedudukan di bawah, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Sekretaris Badan

Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan penyediaan dukungan administrasi bagi seluruh unit organisasi yang berada di bawah naungannya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan memiliki tanggung jawab atas berbagai fungsi, yaitu:

1. Menyiapkan koordinasi kegiatan di lingkungan badan.
2. Menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan badan.
3. Menyiapkan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, mencakup bidang ketatausahaan,

²⁵ Yakobus Adi Saingo, "Penguatan Ideologi Pancasila Sebagai Penangkal Radikalisme Agama," *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 2 (2022): 147–61, <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i2.40994>.

kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan di lingkungan Badan. Menyiapkan koordinasi, pembinaan, dan penataan organisasi serta tata laksana di lingkungan Badan, termasuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.

4. Menyiapkan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan badan.
5. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁶

Sekretaris Badan memiliki tanggung jawab atas dua kepala sub-bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa, yang secara langsung berada di bawah tanggung jawab Kepala Badan, memiliki tugas utama dalam persiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan hasilnya di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama. Selain itu, bidang ini juga memiliki tanggung jawab terkait aspek Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, sebagai pemimpin bidang, memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama.
2. Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

²⁶ "No Title," n.d., <http://kesbangpol.jogjaprov.go.id/bidang/9-sekretariat>.

3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁷

c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan, memiliki tanggung jawab utama dalam persiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan hasilnya di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, sebagai pemimpin bidang, menjalankan fungsi-fungsi berikut:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri.
2. Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi kemasyarakatan.
3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Referensi pada penelitian sebelumnya merupakan elemen integral dalam kerangka penelitian. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi dan mengulas penelitian terdahulu serta menjelaskan perbedaannya. Penelitian sebelumnya berperan penting dalam membandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang pada gilirannya menambah nilai orisinalitas penelitian tersebut. Menurut pandangan penulis, data pendukung yang diambil sebagai referensi adalah informasi yang relevan

²⁷ "No Title," n.d., https://bakesbangpol.demakkab.go.id/?page_id=8.

²⁸ "<https://kesbangpolinmas.demakkab.go.id>."

dengan isu yang tengah diselidiki. Dalam rangka penelitian ini, penulis memutuskan untuk menggali literatur yang telah ada sebelumnya, terutama penelitian yang terkait dengan isu-isu utama dalam penelitian ini. Berikut adalah studi relevan yang ditemukan oleh peneliti:

Pertama, dalam penelitian yang disebutkan, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Faisal Khoir, menjalankan penelitian berjudul "Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Membina Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Jambi". Penelitian ini menitikberatkan pada upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengembangkan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kota Jambi. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data tertentu. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh penulis menggambarkan langkah-langkah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memperkuat ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kota Jambi. Pusat perhatian mencakup permasalahan dan isu-isu strategis yang terkait dengan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kota Jambi, seperti munculnya ajaran atau aliran kepercayaan yang menyimpang, dampak negatif dari kemajuan teknologi, keberadaan organisasi kemasyarakatan yang tidak resmi, pendirian rumah ibadah, dan penurunan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan.²⁹

Kedua, terdapat penelitian yang berjudul "Peran Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Sumatra Utara Dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan" yang dikarang oleh Aulia Asmaul Fauzi sebagai skripsi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini membahas "Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatra Utara dalam Upaya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan". Hasil penelitian tersebut memusatkan perhatian pada aspek administratif, termasuk proses pendaftaran hingga penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pola kerjasama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan

²⁹ Arie Sainab, Ridha, "Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dibidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol& Linmas) Kota Sorong," *Jurnal faksi: ilmu sosial dan ilmu politik* 3, no. 4 (2017): 14–23.

organisasi kemasyarakatan (ormas), terutama ketika muncul isu-isu strategis dan aktual. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengundang ormas untuk memberikan kontribusi pemikiran, seperti masukan dan kritik terkait ideologi, hingga aspek pertahanan dan keamanan negara.³⁰

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Aditya Fauzan, seorang mahasiswa yang menulis skripsi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Masa Pemerintahan Jokowi-Dodo 2014-2019". Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan referensi literatur tambahan. Hasil penelitian ini melibatkan sejumlah permasalahan yang timbul akibat kurangnya pemahaman terhadap usaha pembinaan ideologi Pancasila. Hal ini mencakup kasus intoleransi, gerakan radikal, isu-isu radikalisme, hingga kehilangan kepercayaan terhadap ideologi Pancasila. Di samping itu, penelitian ini juga menyoroti dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat akibat kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.³¹

Keempat, terdapat penelitian berjudul "Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 Dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)" yang ditulis oleh Nur Wasiah Adiwiyono dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif yang bersumber dari hasil wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan posisi kelembagaan negara yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia, dengan merinci aspek yuridis yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008.³²

Kelima, terdapat penelitian berjudul "Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Seluma Dalam

³⁰ Achmad Marwan Nurhadi, "Penguatan Pancasila Sebagai Upaya Merevitalisasi Dan Menumbuhkan Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Masyarakat," *Fkip* 1, no. 2 (2018): 1–12.

³¹ Jantje Tjiptabudy, "Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Pancasila Di Era Reformasi," *Sasi* 16, no. 3 (2010): 1, <https://doi.org/10.47268/sasi.v16i3.780>.

³² Yani, Anggraeni Dewi, dan Guru Sekolah Dasar, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Tantangan di Arus Globalisasi."

Pembinaan Ideologi Pancasila" yang disusun oleh Sheli Marcelina. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Seluma telah secara aktif melaksanakan pembinaan terhadap Ideologi Pancasila. Pendekatan yang dilakukan melibatkan himbauan, komunikasi, daftar ulang, koordinasi, serta sosialisasi yang melibatkan undangan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat. Tujuannya adalah untuk membangun kerjasama yang efektif antara lembaga swadaya masyarakat dan Pemerintah Daerah, Sehingga, organisasi non-pemerintah dapat lebih responsif dan berperan secara aktif sebagai mitra pemerintah dalam mendukung proses pembangunan di Kabupaten Seluma.³³

Saat ini, penulis tengah menulis skripsi yang berkaitan dengan "Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penguatan Ideologi Pancasila Terhadap Masyarakat di Kabupaten Demak". Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif, di mana data akan dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Tujuan utama penelitian ini adalah memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan dan isu-isu strategis terkait ideologi Pancasila di Kabupaten Demak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam membina ideologi Pancasila di daerah tersebut.

C. Kerangka Berfikir

Dalam suatu penelitian, penting untuk memiliki suatu kerangka berpikir yang dapat menjadi dasar atau panduan untuk menentukan arah penelitian. Kerangka berpikir ini membantu membatasi cakupan pembahasan agar fokus pada kajian yang akan diteliti, serta memberikan konsep yang jelas dalam pelaksanaan penelitian di lapangan. Rangkaian kerangka berpikir dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka berfikir dimulai dengan teori ideologi Pancasila, karena terdapat kesesuaian antara identifikasi masalah yang akan diteliti oleh penulis. Selanjutnya, indikator yang akan dijelaskan adalah tantangan globalisasi. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pendekatan

³³ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, "KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA."

yang akan dilakukan adalah penguatan ideologi Pancasila terhadap masyarakat melalui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dari penjelasan diatas dapat dituliskan kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

